



Pemerintah Provinsi Jawa Barat

LAKIP 2021

Laporankinerja Instansi Pemerintah

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Jl. Pasteur No. 25 Bandung
Tahun 2022

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Bandung, 25 Pebruari 2022

Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Dr. Nina Susana Dewi, Sp.PK(K), M, Kes, MMRS



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan
 - 2.1.1. Perencanaan Strategik
 - 2.1.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2021
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 2.3. Program Kegiatan dan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.3. Akuntabilitas keuangan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Simpulan Capaian Indikator Kinerja Utama
- 4.2. Simpulan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategik

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2021



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.201-Org/2020 tentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan
2. Mendorong Dinas Kesehatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.



4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
27. Keputusan Gubernur Nomor 050/354/PP tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
28. Keputusan Gubernur Nomor 050/1668/PP tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 050/354/PP tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;



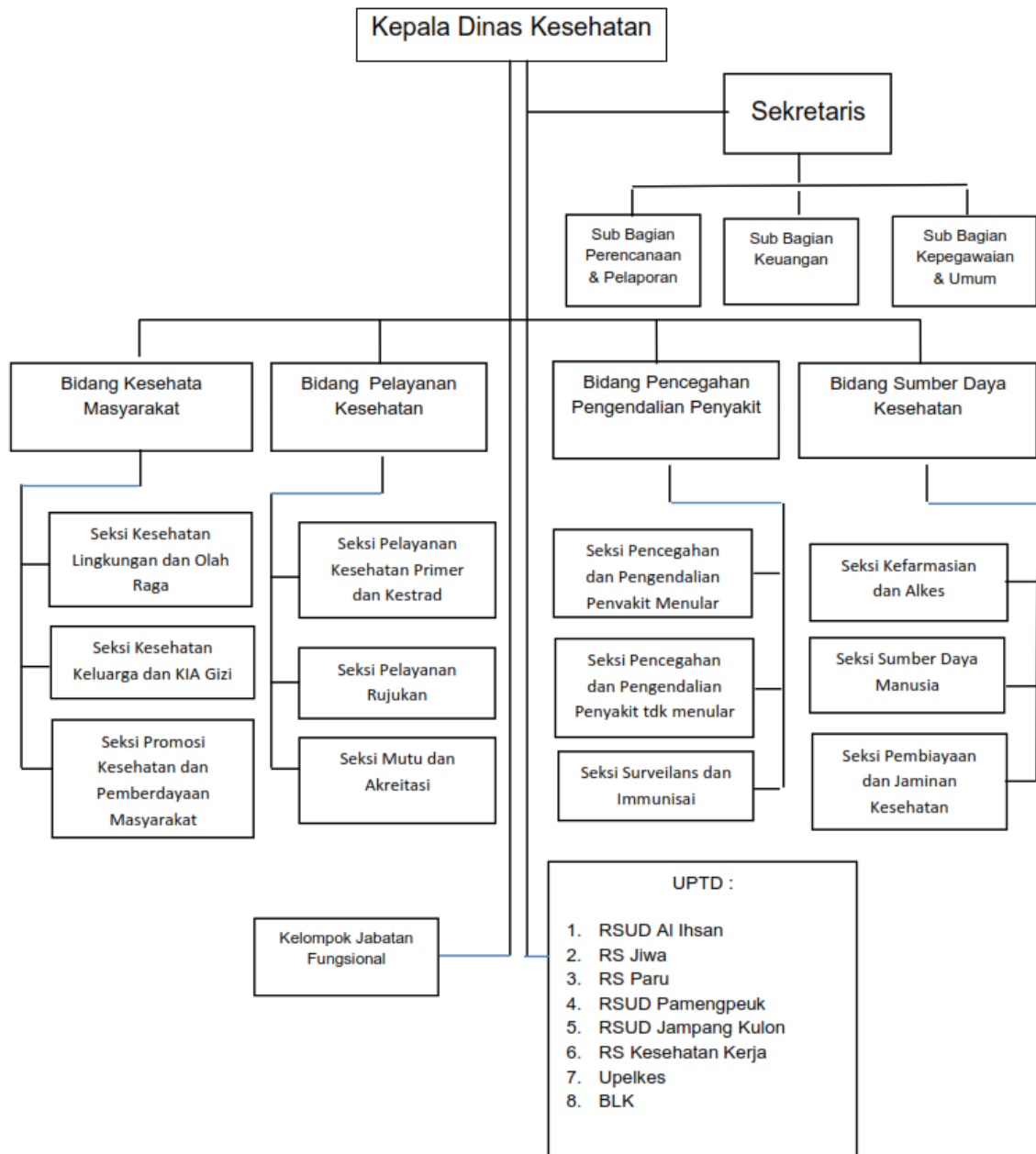
29. Keputusan Gubernur Nomor 13912/KS.01/PP tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 050/2307/PP tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023

1.3. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, Fungsi, Rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Kesehatan, dimana menjalankan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Bidang Pembangunan Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 49 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan provinsi dan Kabupaten / Kota, dimana tipologi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan Tipe A yang mempunyai unit kerja terdiri dari satu sekretariat paling banyak 3 sub bagian, 4 Bidang dengan masing-masing bidang paling banyak 3 seksi, dengan truktur organisasi sebagai berikut :





Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

1.3.1 Tugas Pokok :

Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1.3.2 Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai peraturan pemerintah no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, Rumah Sakit menjadi bagian UPTD Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya berdiri sebagai Perangkat daerah sendiri. Untuk itu sejak tahun 2017 Rumah Sakit Al Ihsan, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Pameungpeuk dan Rumah Sakit Jampang Kulon menjadi UPTD Dinas Kesehatan selain 2 (dua) UPTD dinas kesehatan sebelumnya yaitu UPTD Unit Pelatihan Kesehatan (UPELKES) dan UPTD Laboratorium Kesehatan (LABKES).

Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

No.	BAGIAN BIDANG	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	KEPALA DINAS	1	Dokter, S2
2.	SEKRETARIS	1	Kesehatan ,S2
3.	SUBBAGIAN		
	a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program	1	Kesehatan Masyarakat, S2
	b. Kepala Subbagian Keuangan	1	S1
	c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	1	S2
	d. Staf	61	- S2 = 3 orang - S1/D4 = 27 orang - D3 = 8 orang - SLTA = 22 orang - SLTP = 0 orang - SD = 1 orang
4.	BIDANG	4	
	a. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan	1	Dokter, S2
	1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	1	Dokter, S2
	2. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan	1	S1 Keperawatan
	3. Kepala Seksi Mutu	1	S1 Kesmas



No.	BAGIAN BIDANG	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
	4. Staf	25	- S2 = 5 orang - D3 = 5 orang - S1 = 11 orang - SLTA = 4 orang
b.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	1	S2 Dokter Gigi
	1. Kepala Seksi Kesehatan Gizi Dan Kesehatan Keluarga	1	S1 Kesehatan
	2. Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat	1	S2 Teknik
	3. Kepala Seksi Kesja dan Olah Raga	1	S2 Kesmas
	4. Staf	30	- S2 = 6 orang - D3 = 2 orang - S1/D4 = 16 orang - SLTA = 6 orang
c.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	1	Dokter Gigi, S2
	1. Kepala Seksi Farmasi, Kosalkes dan Mamin	1	Apoteker, S2
	2. Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	1	Dokter, S2
	3. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	S2 Kesehatan
	4. Staf	32	- S2 = 5 orang - D3 = 4 orang - S1/D4 = 15 orang - SLTA = 8 orang
d.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Dokter, S2
	1. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	-	-
	2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	S2 Non Kesehatan
	3. Kepala Seksi Pengamatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	1	Dokter, S2
	4. Staf	31	- S2 = 6 orang - SLTA = 5 orang - S1/D4 = 17 orang - D3 = 3 orang

1.4 Perbandingan anggaran 2020 dan 2021

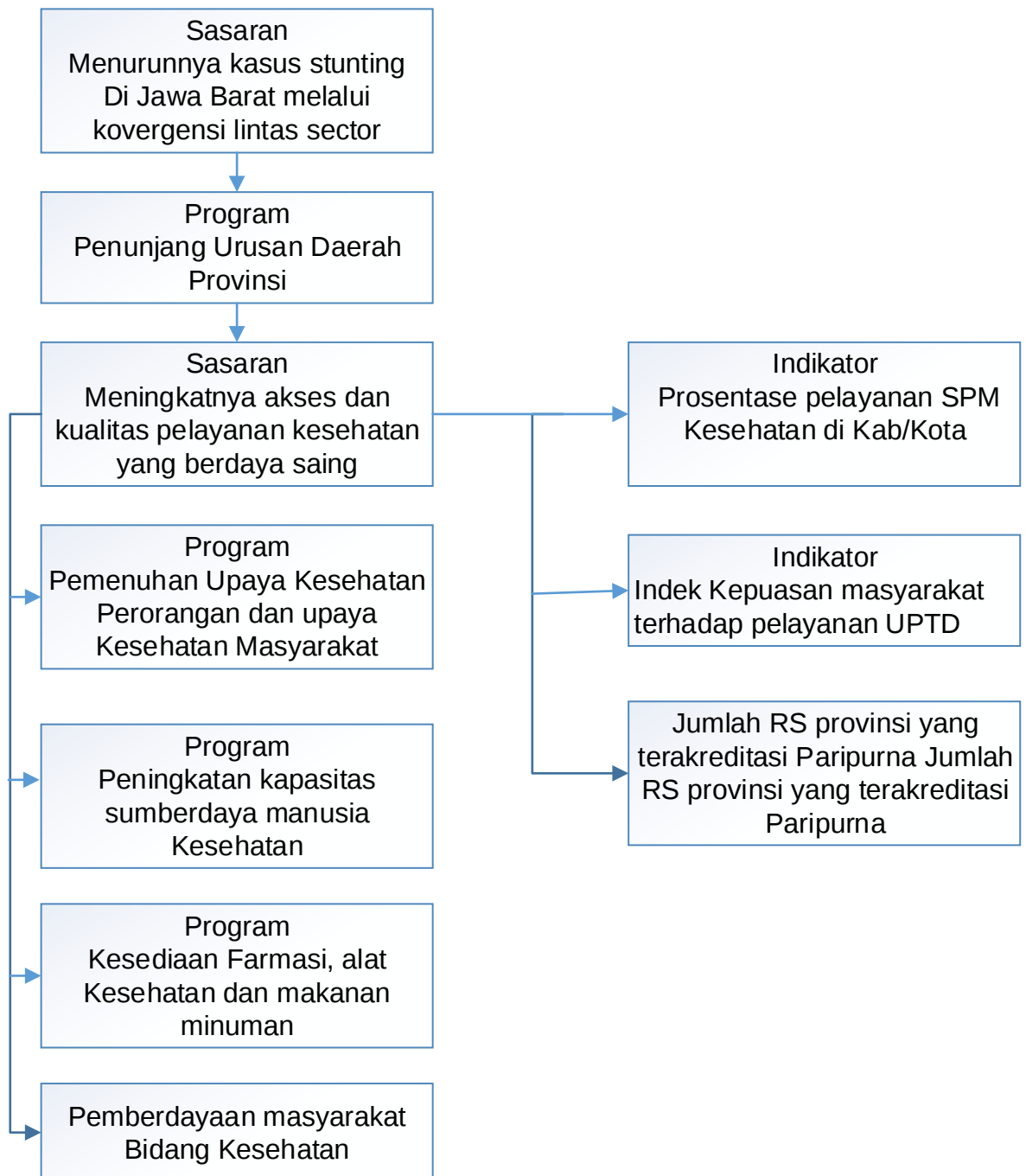
NO	Tahun	Anggaran
1	2020	1.638.458.038.725
2	2021	2,410,513,925,228

Tahun 2021 anggaran Dinas Kesehatan meningkat sebesar Rp. 772.055.886.503 dari tahun 2020.

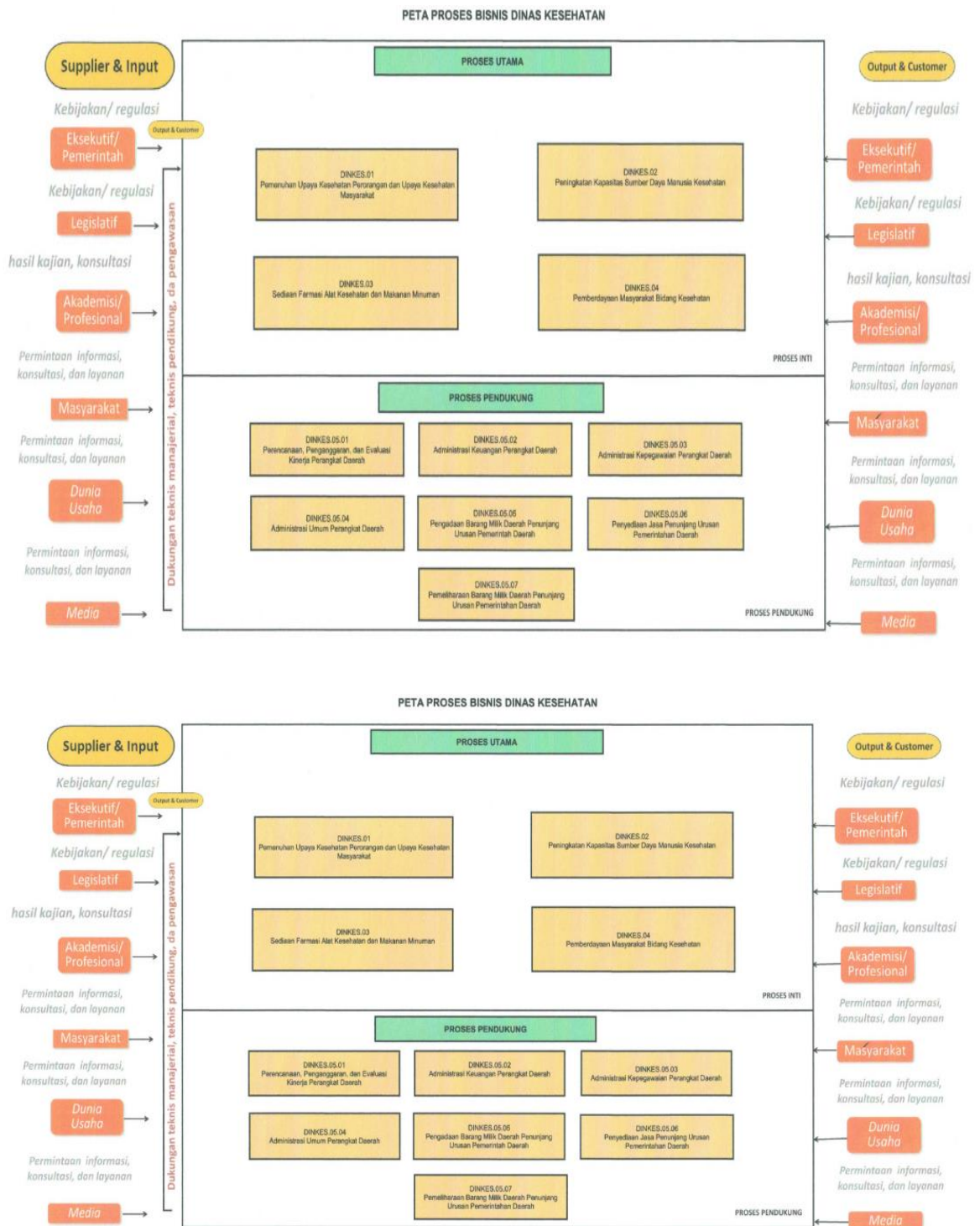


1.5 Cascading Dinas Kesehatan

Cascading Dinas Kesehatan



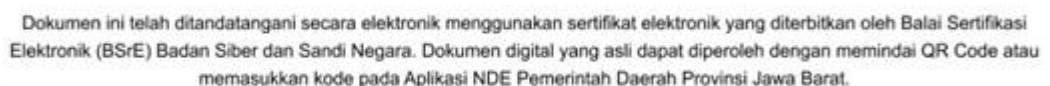
1.6 Proses Bisnis Dinas Kesehatan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



--	--	--



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 adalah **“Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat sebagai

- Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran mesjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
- Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
- Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovas iserta pelaku pembangunan;
- Mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting actual yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya khususnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Maka Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan kesehatan



adalah Misi 2 yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, dengan tujuan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.

2.1.1.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Kesehatan

Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Perumusan Tujuan Dinas kesehatan diperlukan sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.. Adapun Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di dalam Renstra Tahun 2018-2023 ialah “Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan ditopang oleh Sistem Kesehatan Daerah yang Tangguh”

Sasaran dan Indikator Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan, telah ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing, dengan indicator :
 - Persentase pelaksanaan SPM di kabupaten/kota
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD
 - Jumlah Rumah Sakit Provinsi yang Terakreditasi Paripurna
2. Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sector, dengan indicator prevalensi stunting.

Strategi, Kebijakan dan Program

Dalam rangka mencapai Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan strategi dan kebijakan yang menjadi panduan dalam melakukan program/kegiatan dalam periode 5 tahun.



1. Strategi

1) Strategi dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing ;

- a. Peningkatan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat melalui peningkatan mutu layanan dan pemertaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; pencegahan dan pengendalian penyakit dan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. Peningkatan jumlah, mutu dan persebaran sumber daya manusia kesehatan;
- d. Peningkatan penatalaksanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
- e. Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- f. Penguatan pengelolaan manajemen data dan informasi serta regulasi kesehatan

2) Strategi dalam menurunkan kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sector, yaitu:

- a. Penguatan pelayanan gizi dengan pendekatan 1000 HPK dan *continuum of care*
- b. Peningkatan intervensi langsung kepada balita stunting
- c. Penguatan kerjasama/kolaborasi semua sumber daya meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media dalam konvergensi kegiatan
- d. Peningkatan penyuluhan perubahan perilaku pada keluarga melalui berbagai media promosi kesehatan
- e. Penguatan system surveilans gizi yang terintegrasi

2. Arah Kebijakan :

- 1) Arah kebijakan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing, yaitu:
 - a. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan sesuai SPM



- b. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPTD
 - c. Meningkatkan kualitas dan perluasan layanan RS Provinsi
 - d. Memperkuat pembinaan dan pengelolaan BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan
 - e. Memperkuat system kesehatan daerah provinsi
 - f. Memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah pengembangan, pusat pusat kegiatan dan wilayah perbatasan
- 2) Arah kebijakan dalam menurunkan kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sektor
- a. Memperluas intervensi spesifik dan penguatan intervensi sensitive yang terintegrasi
 - b. Memperkuat intervensi konvergensi lintas sektor

3. Program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

2.1.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Perencanaan Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023.

Tujuan Dinas Kesehatan Povinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 :

“Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan ditopang oleh Sistem Kesehatan Daerah yang Tangguh”

Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 :

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Berdaya Saing
2. Menurunnya Kasus Stunting di Jawa Barat melalui Upaya Konvergensi Lintas Sektor.



Indikator :

1. Persentase Pelayanan SPM di Kabupaten / Kota
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan UPTD
3. Jumlah RS yang terakreditasi Paripurna
4. Prevalensi Stunting

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dina kesehatan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	Prosentase pelayanan SPM Kesehatan di Kab/Kota	67,63%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan UPTD	81,26 -81,75
		Jumlah RS provinsi yang terakreditasi Paripurna	3
2	Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sector	Prevalensi stunting	23,2%



2.3 Program Kegiatan dan Anggaran

Program kegiatan yang mendukung sasaran strategis sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
	BELANJA LANGSUNG	2.410.571.261.728,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	363.892.648.662
1	SEKRETARIAT	46.304.300.651
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.794.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	74.840.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.700.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.054.154.760
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.137.800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.948.900
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.976.900
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16.550.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	372.470.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.258.650
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	350.818.058
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.265.507.760
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	247.065.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	499.717.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.715.752.573
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	722.456.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.831.535.001
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.597.700.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.020.791.658
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.996.173.082
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.645.480.951
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	975.200.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.820.032.858
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.938.238.100
2	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	4.753.473.889



	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	50.540.880
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	629.352.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1.022.498.542
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	679.763.958
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	45.558.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	487.371.380
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.780.218.579
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	58.170.550
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	-
3	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	106.293.988.250
	Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengembangan Rumah Sakit	87.460.477.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	209.436.000
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	669.643.840
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	13.640.899.840
	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	234.790.910



	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	695.433.800
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	383.306.860
4	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	26.069.258.247
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.692.960.929
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	16.255.494.625
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.633.745.473
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	487.057.220
5	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	626.076.164.396
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	151.376.719.636
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	77.009.630
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	46.573.611
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	15.262.905
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	120.920.000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	25.547.150.024
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	695.848.715
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	448.196.679.875
6	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	217.919.945.017,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.060.627.424



	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.987.980
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	830.107.375
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	274.987.500
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	180.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	413.872.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Mebel	38.206.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.384.260.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	987.354.175
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	764.056.421
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.300.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.840.628.204
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.100.000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	202.774.870.633
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	497.300.000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	2.062.787.305
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	280.000.000
7	UPTD PELATIHAN KESEHATAN	3.874.105.010,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.000.000



	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.080.400
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.407.788
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	295.785.540
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.864.542
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	64.250.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.860.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.969.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	451.824.368
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.707.557.049
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.355.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	245.008.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	352.506.680
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	52.065.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	369.571.243
8	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT	48.834.584.207,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.525.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.550.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	40.934.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	45.000.000



	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13.170.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	968.752.523
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.940.200
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	134.563.070
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.520.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.764.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	450.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000
	Pengadaan Mebel	23.677.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	955.948.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.548.933.446
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Operasional Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	425.280.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	869.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	990.330.290
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengembangan Rumah Sakit	1.887.694.950
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5.253.902.501
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.239.723.250
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	764.404.911
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	



		16.577.719.926
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	394.000.000
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	13.068.250.640
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	120.500.000
9	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT	115.018.526.488,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.358.616.632
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.250.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.785.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Mebel	825.900.205
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	913.051.284
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	33.030.827.845
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	7.400.000.000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	592.500.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50.000.000
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7.000.000.000
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.919.900.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	



	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	44.366.695.522
10	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANGKULON SUKABUMI	176.156.236.186,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	676.240.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
	Pengadaan Mebel	499.342.952
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.429.762.592
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.348.203.550
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	39.477.131.558
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	19.826.421.977
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	17.595.900.000
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	9.997.531.080
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	275.000.000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7.543.900.000
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	22.668.500.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	99.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	49.719.302.477



11	RSUD AL IHSAN	498.520.624.402,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	150.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.065.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	22.146.298.587
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7.122.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.002.016.780
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.299.923.268
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengembangan Rumah Sakit	9.002.339.160
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	49.911.971.190
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	398.696.010.417
12	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT	75.075.912.151,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.600.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.525.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	49.908.800
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	417.210.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	



	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.125.300
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	358.084.344
	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.658.370.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.320.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	901.499.570
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.537.527.871
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	471.060.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.534.048.378
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.687.537.694
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	24.070.017.575
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	500.000.000
	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	194.565.000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	12.519.782.000
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	2.343.926.943
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	21.500.000
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	200.000.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	24.274.303.676
13	UPTD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT	101.781.494.172,00



	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.838.941
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	87.641.207
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	488.298.965
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	589.065.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.750.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357.310.700
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.580.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.391.672
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.346.342.571
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	218.450.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	615.150.000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	4.329.919.176
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	371.954.400
	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	5.220.383.470
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	4.242.389.370
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	842.895.000
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	1.349.178.300
	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	2.286.949.700
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	205.050.185
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	930.380.000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	396.619.952



	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	64.606.900
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	325.770.000
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.010.783.203
	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	52.750.000
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	61.380.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	411.229.010
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	119.044.369
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	706.140.000
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.012.450.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	64.745.802.081



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategik

3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategik Tahun 2021

Capaian kinerja sasara strategik dinilai dengan 4 katagori penilaian sararan yaitu baik sekali, baik, cukup, dan kurang, dengan kriteria sebagai berikut

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
$\geq 100 \%$	Sangat Baik
$> 80 - < 100 \%$	Baik
$> 55 - < 80 \%$	Cukup
$< 55 \%$	Kurang

Capaian indikator kinerja Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

SASARAN 1

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing

Sasaran ini diukur melalui indicator persentase pelayanan SPM Kesehatan di Kab/Kota, Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPTD dan Jumlah RS provinsi yang terakreditasi Paripurna. Berikut capaian dri masing-masing indikator:

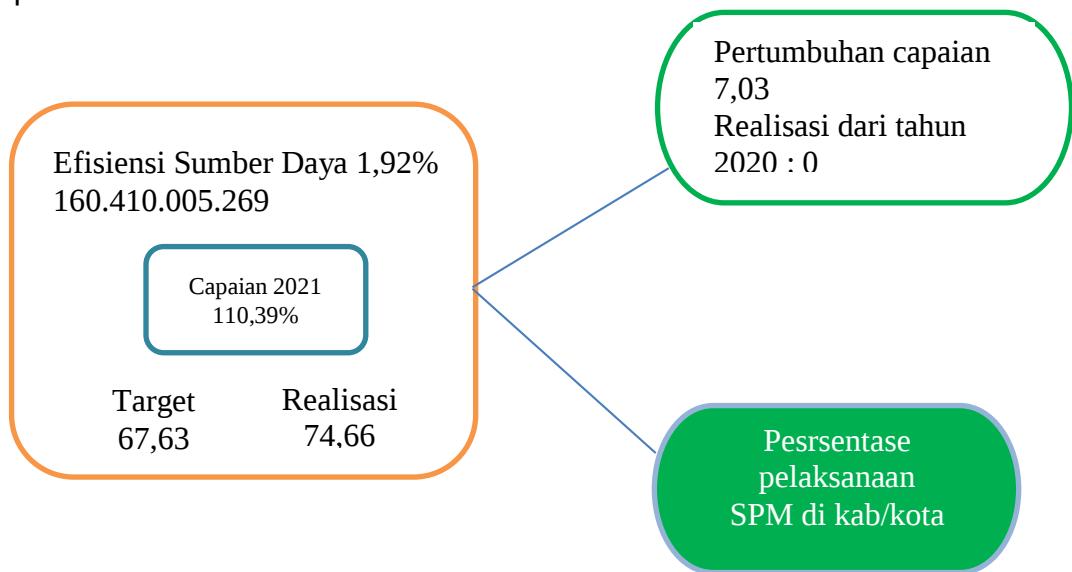
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	Prosentase pelayanan SPM Kesehatan di Kab/Kota	74,66%	110,39	Sangat baik
		Indek Kepuasan masyarakat	81,99	100,90	Sangat baik

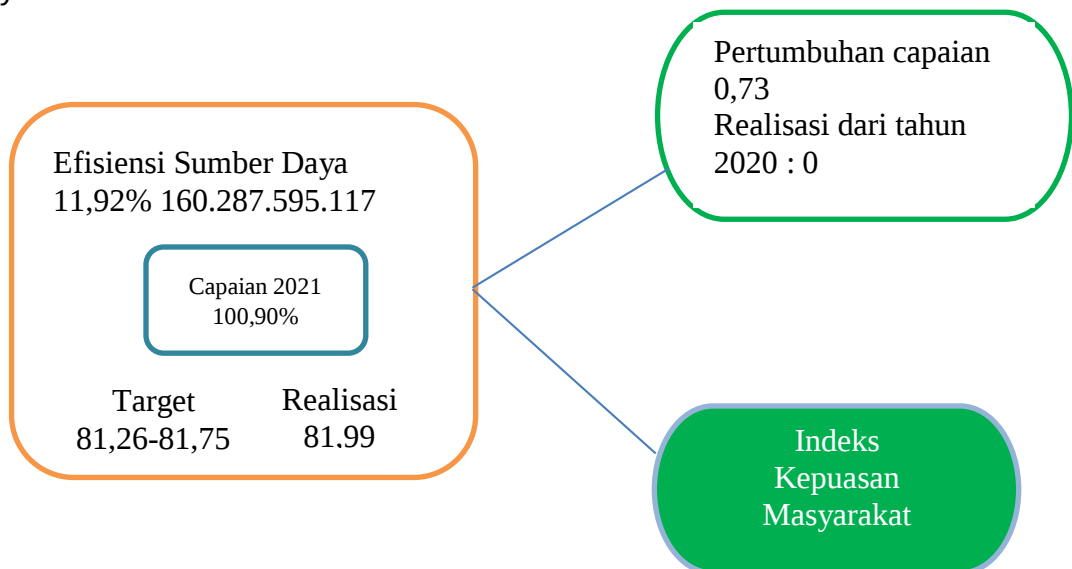


		terhadap pelayanan UPTD			
		Jumlah RS provinsi yang terakreditasi Paripurna	3	100	Sangat baik

Tingkat Pertumbuhan Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan SPM di Kabupaten/Kota

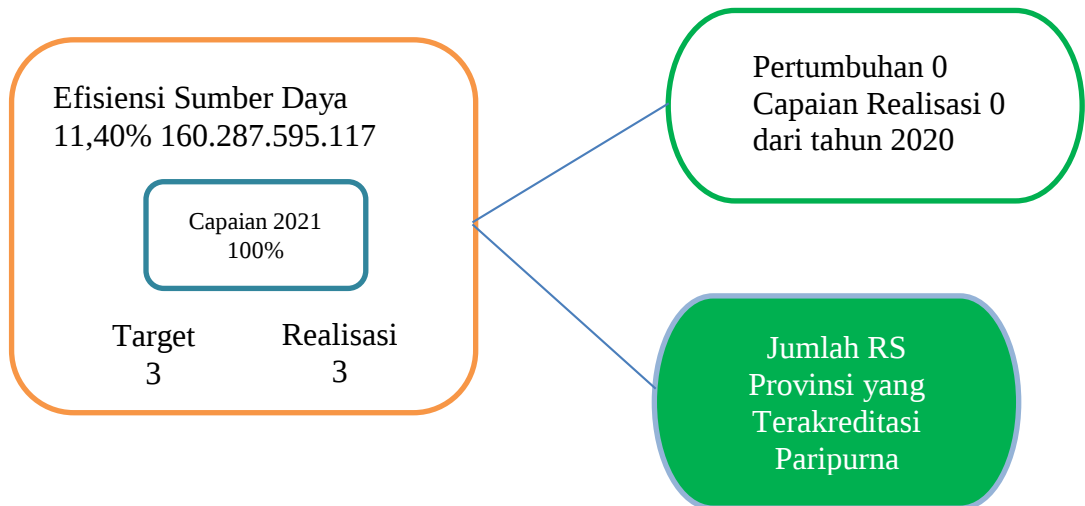


Tingkat Pertumbuhan Capaian Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPTD



Tingkat Pertumbuhan Capaian Indikator Jumlah RS provinsi yang terakreditasi Paripurna





SASARAN 2

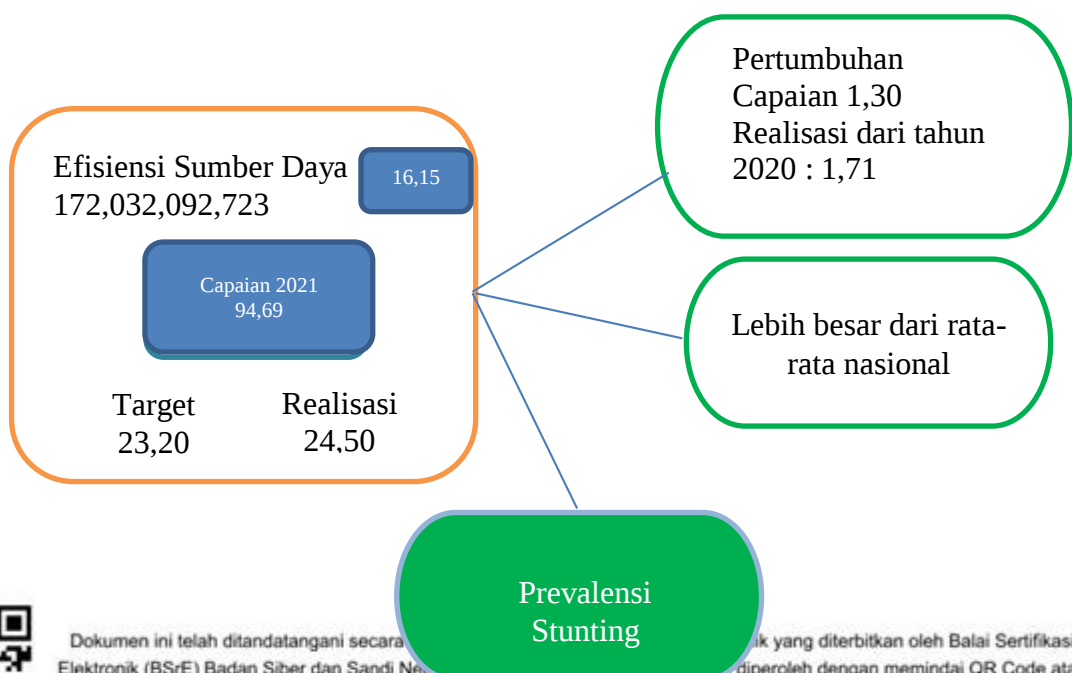
Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sector yang diukur dengan indicator prevalensi stunting.

Tabel. 3.2

Capaian Indikator Prevalensi Stunting Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian%	Kategori
4	Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sector	Prevalensi stunting	24,5%	94,69	Baik

Tingkat Pertumbuhan Capaian Indikator Prevalensi Stunting



3.2 Analisis Capaian

Sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing :

1. Indikator Persentase Pelayanan SPM di Kab/Kota.
 - Realisasi 74,66 dengan capaian 110,39% sudah memenuhi target
 - Indikator ini adalah baru tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya
 - Capaian terhadap akhir Renstra 73,7%
2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan UPTD
 - Realisasi 81,99 dengan capaian 100,9% sudah memenuhi target
 - Indikator ini baru tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya
 - Capaian terhadap akhir Renstra 91,10%
3. Dengan indikator Jumlah RS provinsi yang terakreditasi Paripurna
 - Realisasi 3 dengan capaian 100%
 - Indikator ini baru tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya
 - Capaian terhadap akhir Renstra 50%

Sasaran menurunnya kasus stunting di Jawa Barat dengan indikator prevalensi stunting:

- Dengan realisasi 24,5% dengan capaian target 94,69 %
- Dibanding tahun sebelumnya ada penurunan capaian 1,5 %, bila dilihat dari target yang dinaikkan menjadi 23,20% sementara untuk tahun sebelumnya target 26,21%, realisasi tahun ini masih lebih baik
- Dibandingkan dengan rata-rata nasional masih lebih besar 0,10% dengan rata-rata nasional 24,4%
- Capaian Akhir Renstra Dinas 78,37%

Permasalahan pada tahun 2021 terjadi puncak pandemic Covid-19 yang mengakibatkan beberapa target tidak tercapai.

Upaya/Tindak lanjut yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target indikator ialah melakukan orientasi tatalaksana gizi buruk untuk petugas puskesmas, melakukan diseminasi PMBA untuk petugas



puskesmas, advokasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor, mendorong kabupaten/kota untuk optimalisasi pelayanan gizi selama pandemi dengan mengeluarkan protokol pelayanan gizi semasa pandemi, mendorong kabupaten kota untuk melakukan inovasi pelayanan percepatan penurunan stunting, melakukan penilaian konvergensi stunting di 20 kabupaten kota lokus, melakukan evaluasi percepatan penurunan stunting di Jawa Barat, melakukan sosialisasi pelayanan gizi di masa pandemi, menyusun protokol pelayanan gizi selama pandemik, pembuatan SK Tim Percepatan Penurunan Kematian Ibu, Bayi dan stunting, pembuatan Draf RAD percepatan Penurunan Stunting, dan Rapeda Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Barat.

3.3. Capaian keuangan

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Tahun 2021

Sasaran	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
Menurunnya Kasus stunting di Jawa Barat	1.065.078.546,079	893,046,453,356	83,84%
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	1.345,435,379,149	1.185,447,036,773	88,10 %
	2.410.513.925.228	2.078,493,490,129	86,22 %

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran dari sasaran menurunnya kasus stunting di Jawa Barat realisasinya Rp 893,046,453,356 atau 83,84 %, ada efisiensi sebesar Rp 172,032,092,723 atau 16,15%. Sedangkan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan realisasi 1.185,447,036,773,- atau 88,10 %, ada efisiensi sebesar Rp. 159,988,342,376, atau 13,49%, adanya efisiensi terdiri dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber



Tabel 3.4
Realisasi Program 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,065,078,546,079	893,046,453,356
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,135,954,108,604	1,006,829,750,258
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	208,518,041,149	177,767,467,271
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	61,836,516	41,463,314
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	901,392,880	808,355,930
Total		2,410,513,925,228	2,078,493,490,129



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. Di dalamnya potret pencapaian kinerja sasaran pembangunan daerah berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Dokumen perencanaan tersebut berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Secara umum dapat disampaikan bahwa pencapaian digambarkan melalui pencapaian 4 indikator kinerja sasaran dengan 3 indikator rata-rata 100,9% sedangkan satu indikator capainnya 94,69.

Realisasi kinerja Dinas Kesehatan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021 dengan efisiensi anggaran sebesar 14,47% . Secara umum, kinerja Dinas Kesehatan telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dan harus ditingkatkan di tahun mendatang, Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Terus berupaya mempertahankan kinerja yang telah baik
2. Melakukan koordinasi internal yang intensif agar peningkatan kinerja baik pada level administrator, pengawas/koordinator untuk ditingkatkan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT,

dr. R. NINA SUSANA DEWI, Sp.PK (K), M.Kes., MMRS.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN LAMPIRAN

Perjanjian kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA DINAS KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **dr. R. NINA SUSANA DEWI, Sp.PK.(K)., M,Kes., MMRS**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT**
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

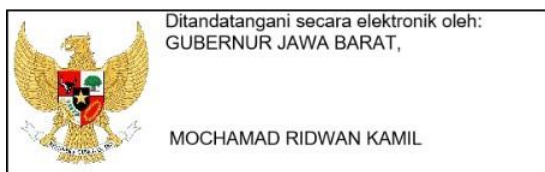
Nama : **MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**

Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT**
selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

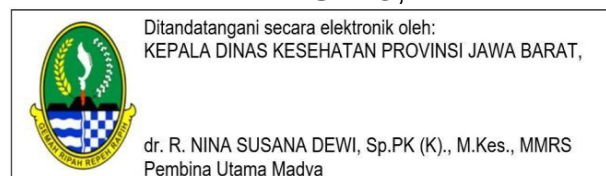
PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,



Bandung, 27 Januari 2022
PIHAK KESATU,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	Presentase Pelayanan SPM Kabupaten/Kota	68,92
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan UPTD	81,76- 82,25
		Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi paripurna	3
2	Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat melalui upaya konvergensi lintas sektor	Prevalensi stunting	21,2%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 677,737,005,532	APBD
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 183,594,069,383	APBD
3.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 3,203,655,032	APBD
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 175,115,164	APBD
5.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 1,096,419,576,246	APBD
6.	Dukungan Manajemen (020037)	Rp. 4,253,930,000	APBN
7.	Kesehatan Masyarakat (029015)	Rp. 46,015,335,000	APBN
8.	Pelayanan Kesehatan dan JKN (029016)	Rp. 1,108,207,000	APBN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

moleh

No.	Program	Anggaran	Keterangan
9.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (029017)	Rp. 18,378,084,000	APBN
10.	Pelayanan Kesehatan dan JKN (029018)	Rp. 162,569,000	APBN
11.	Pelayanan Kesehatan dan JKN (029019)	Rp. 2,456,828,000	APBN

Bandung, 27 Januari 2022

GOVERNOR JAWA BARAT,

HEAD OF HEALTH
PROVINSI JAWA BARAT,

